

**LOKAKARYA**  
**KULIAH KERJA NYATA (KKN)**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

Bogor, 30 Oktober 1993

*LOK KKN - I*

***MENCARI ALTERNATIF PENYEMPURNAAN  
PELAKSANAAN KKN DI IPB***

*Oleh :*

*Pembantu Rektor I IPB*



**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**  
**1993**

**MENCARI ALTERNATIF PENYEMPURNAAN  
PELAKSANAAN KKN DI IPB <sup>1)</sup>**

Oleh

Sadan Widarmana <sup>2)</sup>

**PENDAHULUAN**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara formal, yaitu yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah berjalan sejak lebih kurang 17 tahun yang lalu. Namun sebenarnya kegiatan semacam itu telah dilaksanakan di IPB sejak awal berdirinya dalam bentuk praktek lapang, praktek umum, praktek sosiologi pedesaan dan sebagainya. Dalam perkembangannya, pelaksanaan KKN itu telah mengalami berbagai perubahan dalam orientasi, substansi dan status akademisnya.

Akhir-akhir ini, sehubungan dengan semakin santernya lontaran masalah relevansi pendidikan dan efisiensi serta kualitas proses belajar mengajar, pelaksanaan KKN ini dipermasalahkan lagi. Berkaitan dengan itu, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) mengambil prakarsa menyelenggarakan lokakarya KKN yang akan membahas beberapa issue seperti :

- a) Apakah KKN IPB selama ini telah mencapai tujuannya terutama relevansinya dalam menopang kemampuan keilmuan mahasiswa.
- b) Apakah KKN IPB bermanfaat bagi masyarakat luas.
- c) Bagaimana proporsi relatif unsur-unsur pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam KKN yang dinilai layak.
- d) Pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan KKN.

---

<sup>1)</sup> Makalah disampaikan pada Lokakarya KKN IPB, di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat IPB tanggal 30 Oktober 1993;

<sup>2)</sup> Pembantu Rektor I IPB.

Makalah ini, walaupun ditulis oleh Pembantu Rektor I, tidaklah dimaksudkan sebagai "*position paper*" yaitu makalah yang menyuarkan kebijakan IPB yang akan ditempuh. Sebagaimana diketahui bersama, kebijakan yang berlaku selama ini adalah yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 1993 sebagai penjabaran SK Rektor No. 140/Um/1990.

Pendapat-pendapat yang diajukan dalam tulisan ini merupakan sumbangan pikiran dalam rangka upaya kita bersama untuk menyempurnakan pelaksanaan KKN agar lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat.

### PELAKSANAAN KKN DI IPB

Sebagaimana disinggung pada Pendahuluan, pelaksanaan KKN di IPB telah mengalami berbagai perubahan dalam orientasi dan substansi. Sebelum KKN dicanangkan secara nasional, kegiatan mahasiswa di lapangan merupakan unsur yang esensial dalam pendidikan ilmu-ilmu pertanian (dalam arti luas) dalam bentuk praktek lapangan, praktek umum, praktek sosiologi pedesaan dll. Unsur yang paling menonjol dalam kegiatan praktek ini ialah profesionalisme, yaitu mengusahakan agar mahasiswa memperoleh pengalaman praktis seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya dalam bidang ilmunya masing-masing. Unsur "*pengabdian*" juga ada, tetapi tidak ditekankan.

Perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa KKN di IPB dilaksanakan sejauh mungkin mengikuti Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Perguruan Tinggi (Edisi ke 3) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen DIKTI (1993). Berdasarkan Pedoman tersebut, tujuan KKN secara singkatnya adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan pendidikan pelengkap kepada mahasiswa.
- b) Membantu masyarakat melancarkan pembangunan di lokasinya masing-masing.

Berdasarkan Pedoman tersebut, jelas bahwa KKN mempunyai tujuan ganda, yaitu di samping memberikan pendidikan pelengkap kepada mahasiswa, juga memberikan bantuan kepada masyarakat setempat.

Hal ini sangat masuk akal karena perguruan tinggi di samping merupakan tempat melatih dan menggodok calon-calon ilmuwan dan tenaga pembangunan, juga merupakan gudang ilmu dan teknologi. Sementara itu masyarakat setempat, khususnya petani, memang sangat memerlukan bantuan dari pihak luar untuk meningkatkan kesejahteraannya.

#### KRITIK TERHADAP PEDOMAN PELAKSANAAN KKN

Konsep KKN seperti dikemukakan dalam Pedoman tersebut di atas dilatarbelakangi oleh kondisi-kondisi pendidikan tinggi dan masyarakat petani/pedesaan yang berlaku pada masa lebih dari dua dasawarsa yang lalu.

Ada dua hal pokok yang berbeda pada waktu konsep KKN dicitakan dengan kondisi pada saat ini yaitu :

- a) Masalah relevansi. Pada waktu itu masalah ini tidak dipersoalkan atau tidak ditonjolkan. Pengalaman mahasiswa di lapangan atau di pedesaan dianggap sangat bermanfaat bagi mahasiswa, tidak peduli apa bidang studinya. Pedoman Pelaksanaan KKN menyebutkan bahwa tujuan KKN yang pertama adalah memberikan pendidikan "pelengkap". Bagi mahasiswa hukum atau ekonomi mungkin benar bahwa pengalaman di lapangan merupakan pendidikan pelengkap. Bagi mahasiswa pertanian, pengalaman praktis di lapangan bukanlah pelengkap, melainkan termasuk pendidikan pokok.
- b) Masalah unsur pengabdian mahasiswa. Waktu itu mahasiswa dianggap unsur yang paling penting dari perguruan tinggi dalam mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat pada waktu itu belum ada atau belum terorganisasi secara baik. Sekarang ini, hampir semua

perguruan tinggi, negeri maupun swasta, mempunyai kelembagaan pengabdian kepada masyarakat, sehingga kegiatan pengabdian yang semula dibebankan pada mahasiswa, dapat diambil alih oleh lembaga tersebut.

Perlu pula diperhatikan bahwa dewasa ini desa merupakan ladang tempat berbagai instansi dan lembaga berlaga melaksanakan berbagai proyek pembangunan. Dengan demikian apabila perguruan tinggi mengurangi intensitas pengabdianya dengan membebaskan mahasiswa dari kewajiban tersebut kiranya tidak akan merugikan masyarakat. Bahkan mungkin akan menolong masyarakat mengurangi kejenuhan dan kecenderungan ketergantungan pada bantuan "dari atas".

#### TUNTUTAN KURIKULER

Bahwa KKN memberikan manfaat kepada banyak pihak, terlepas dari relevansi dan lain-lain, tidaklah diragukan. Manfaat bagi mahasiswa seperti pengalaman hidup dan bergaul dan merasakan kehidupan yang serba sederhana di pedesaan, pengalaman bekerja secara kelompok, terpadu dan interdisipliner, melatih kemandirian, dan sebagainya merupakan segi-segi positif dari KKN yang dilaksanakan selama ini.

Namun di lain pihak para pengelola pendidikan tinggi akhir-akhir ini dihadapkan pada tuntutan-tuntutan kurikuler yang aktual yaitu masalah relevansi atau keterkaitan kurikulum dengan keperluan masyarakat, masalah kualitas proses belajar mengajar, masalah efisiensi, di samping masalah daya tampung atau pemerataan kesempatan (partisipasi).

Masalah-masalah tersebut ditekankan kembali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengarahannya pada Rapat Kerja Nasional Departemen P dan K tahun 1993. Masalah relevansi misalnya, dijabarkan dalam strategi "link and match" yang dalam lingkup pendidikan tinggi mencakup :

1. Meningkatkan kerjasama dengan dunia kerja, dunia usaha dan industri.
2. Memperkuat kegiatan praktek lapang, kuliah kerja dan magang sesuai dengan bidang studinya.

Apabila strategi dan implementasi link and match tersebut dikaitkan dengan KKN, maka penafsirannya menurut penulis adalah sebagai berikut :

- a) Butir 1: Lokasi dan objek KKN sebaiknya diprioritaskan "**dunia kerja**" seperti BUMN (PT Perkebunan, Perum Perhutani, Perikani), industri swasta, dan instansi-instansi pemerintah.
- b) Butir 2: "**Memperkuat**" berarti meningkatkan relevansi, perbaikan perencanaan, pengelolaan dan pendanaan KKN. "**Sesuai dengan bidang studi**" berarti penekanan harus ditempatkan pada keprofesian mahasiswa.

Dengan mengemukakan beberapa butir pengarahan Menteri P dan K pada Rakernas 1993 di atas, tidaklah berarti bahwa konsep KKN yang mendasari Pedoman Pelaksanaan KKN tersebut perlu diubah, melainkan perlu diberikan peluang untuk mengakomodasikan issue-issue menonjol seperti relevansi dan efisensi tersebut.

Tuntutan peningkatan efisiensi dalam proses belajar mengajar mengharuskan pimpinan perguruan tinggi dan seluruh jajarannya untuk mengevaluasi kembali secara lebih cermat manfaat-manfaat KKN yang diperoleh mahasiswa dan masyarakat dibandingkan dengan biaya (cost) atau pengorbanan yang harus dikeluarkan terutama dari segi waktu yang diperlukan.

Salah satu yang menonjol yang menjadi sorotan fakultas/program studi dalam pelaksanaan KKN selama ini ialah bahwa bagi fakultas atau program studi tertentu, lokasi dan proyek-proyek yang dikerjakan mahasiswa tidak sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Hal ini dirasakan sebagai pemborosan waktu yang manfaatnya tidak sebanding dengan pengorbanannya. Lain halnya kalau waktu dua bulan itu dipakai untuk mempelajari secara khusus dan intensif segi-segi praktis dari bidang ilmu yang diminati mahasiswa.

Bagi fakultas/program studi yang di luar KKN tidak menyediakan peluang untuk praktek lapang lainnya, hal ini merupakan suatu kehilangan kesempatan bagi mahasiswa untuk :

- a) Memperoleh pengalaman praktek yang memadai dalam bidangnya.
- b) Memperoleh kesempatan kontak dan saling mengenal dengan instansi/perusahaan, industri atau bidang usaha yang potensial sebagai calon employer. Sebagai contoh dikemukakan semakin berkurangnya tamatan IPB yang berkerja di PT Perkebunan.

### SUATU ALTERNATIF

Dengan menyadari sepenuhnya akan pentingnya unsur pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dan nilai pengalaman mahasiswa dalam bergaul dengan masyarakat selama pelaksanaan KKN, dan mengingat pula bahwa issue relevansi, efisiensi dan kualitas pendidikan juga perlu ditanggapi secara bersungguh-sungguh, maka berikut ini dikemukakan usul alternatif penyempurnaan pelaksanaan KKN di IPB.

#### a. Substansi

Memberikan kewenangan kepada fakultas/program studi masing-masing untuk menentukan substansi KKN sesuai dengan tuntutan kurikulum masing-masing. Yang dimaksud dengan substansi adalah materi dan lokasi KKN.

#### b. Waktu

Tiap fakultas/program studi dapat menentukan lama KKN dan waktu pelaksanaannya sesuai dengan jatah waktu yang disediakan oleh kurikulum masing-masing.

#### c. Status/beban akademis

Jumlah sks KKN dapat berbeda sesuai dengan kurikulum masing-masing.

#### d. Pengelolaan

KKN dapat dikelola secara terpusat oleh LPM seperti sekarang ini atau oleh fakultas masing-masing. Mengingat pengalaman, sarana dan hubungan-hubungan yang sudah dibina LPM selama ini, cara pengelolaan terpusat dirasakan lebih sesuai.

**PENUTUP**

Demikianlah secara singkat dikemukakan usul alternatif penyempurnaan pelaksanaan KKN di IPB yang diharapkan dapat menampung dan mengakomodasikan aspirasi yang hidup di fakultas-fakultas/program studi, didahului dengan mengemukakan argumentasi bahwa menanggapi issue-issue yang menonjol seperti relevansi, efisiensi dan kualitas pendidikan, lebih bermakna daripada mengikuti secara harfiah Pedoman Pelaksanaan KKN dari Ditjen DIKTI yang konsep pertamanya memang dilandasi oleh kondisi-kondisi yang berlaku pada lebih dari dua dasawarsa yang lalu.